

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Nagari Sungai Rumbai Timur

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk penggunaan hak dalam menyampaikan pendapat dalam rangka pengambilan keputusan serta akses dan kontrol terhadap sumber daya. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di lingkungannya. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, maka pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik. Apapun bentuk partisipasinya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan desa terdapat asas partisipatif dan transparan. Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa

dan unsur masyarakat desa, sedangkan asas transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan desa. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan desa adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan kedua asas diatas, masyarakat mempunyai peran penting dalam penyusunan APBDesa, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam rangka menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan; menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (swadaya); dan memberikan legitimasi atau keabsahan atas segala yang telah diputuskan.

Nagari Sungai Rumbai Timur merupakan pemekaran dari Nagari Sungai Rumbai yang jumlah penduduknya semakin lama semakin banyak. Pemekaran terjadi pada tahun 2010 dengan berdasarkan kepada Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dan Perda Kabupaten Dharmasraya No. 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari. Nagari Sungai Rumbai Timur berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya. Nagari Sungai Rumbai Timur memiliki luas wilayah 546 Ha. Secara geografis, nagari Sungai Rumbai Timur terletak pada $1^{\circ} 11' 14,30''$ LS - $1^{\circ} 14' 07,52''$ LU dan $101^{\circ} 43' 36,03''$ BT - $101^{\circ} 44' 18,35''$ BB dengan

ketinggian 480 mdpl. Batas daerah nagari Sungai Rumbai Timur adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Koto Baru.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tukum, Jambi.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Kurnia Selatan dan Nagari Kurnia Koto Salak.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sungai Rumbai.

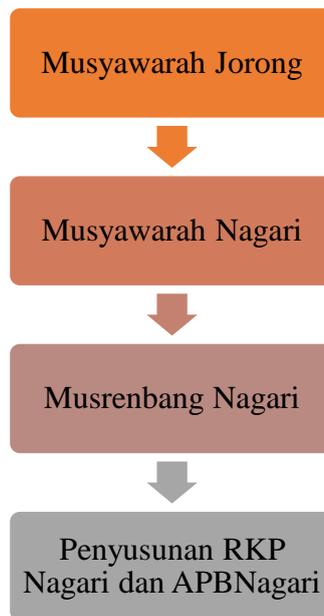
Nagari Sungai Rumbai Timur terdiri dari empat jorong, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.1 Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Nagari Sungai Rumbai Timur untuk Masing-Masing Jorong

No.	Nama Jorong	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (2016)
1.	Kampung Baru	313	440
2.	Bukit Berbunga	89	1012
3.	Balai Timur	20	793
4.	Kambang Baru	124	1107
Jumlah		546	3352

(Sumber: LKPJ Nagari Sungai Rumbai Timur Tahun 2016)

Pada tahun 2016 Nagari Sungai Rumbai Timur mengajukan pemekaran jorong seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Jorong Ujung Koto diajukan sebagai pemekaran dari Jorong Kambang Baru dan Jorong Pasa Pagi sebagai pemekaran dari Jorong Bukit Berbunga.



Gambar IV.1 Proses Penyusunan APBNagari di nagari Sungai Rumbai Timur

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Nagari Sungai Rumbai Timur secara ringkas dapat dilihat pada **Gambar IV.1**. Partisipasi masyarakat dimulai dari tahapan paling bawah, yaitu musyawarah di tingkat jorong. Musyawarah tersebut diikuti oleh semua unsur masyarakat bersama dengan wali jorong. Dalam musyawarah, masyarakat membahas masalah dan potensi yang ada di masing-masing jorong. Berdasarkan masalah dan potensi yang ada, dikaji berbagai bidang dan sektor di masing-masing jorong untuk menentukan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan serta program kegiatan yang akan dirumuskan. Selanjutnya, diselenggarakan musyawarah di tingkat nagari oleh BPD yang di Nagari Sungai Rumbai Timur disebut sebagai BAMUS (Badan Musyawarah). BAMUS di Nagari Sungai Rumbai Timur beranggotakan 6 orang. Bapak

Mendri Doni selaku Sekretaris Nagari Sungai Rumbai Timur menjelaskan sebagai berikut.

“Dalam proses perancangan, kami selalu melakukan musyawarah dimulai dari jorong. Setelah musyawarah di jorong, hasil pembahasan dibawa ke nagari untuk dimusyawarahkan lagi dengan perangkat nagari dan juga BAMUS yang merupakan nama lain dari BPD. BAMUS beranggotakan beranggotakan unsur-unsur masyarakat yang juga melibatkan perempuan dan pemuda.”

Musyawarah nagari sangat penting dalam mewujudkan demokrasi berlandaskan musyawarah, dimana keputusan penting terkait kehidupan masyarakat nagari tidak hanya diputuskan oleh pemerintah nagari, melainkan oleh seluruh komponen masyarakat. Bapak Ihsanul Habibie selaku Kepala Seksi Kesejahteraan menyampaikan “salah satu bentuk nyata dari partisipasi masyarakat dalam APBNagari yaitu apa yang akan dilakukan dan pembangunan yang akan dilaksanakan di Nagari ini tetap usulan utamanya adalah dari usulan masyarakat itu sendiri dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemudian melalui musyawarah dipilih hal yang paling dibutuhkan masyarakat berdasarkan usulan-usulan yang ada”. BAMUS bertanggungjawab memastikan kelompok-kelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara partisipatif.

Hasil rencana pembangunan dan program kegiatan yang dibahas pada musyawarah tingkat jorong dibahas lagi pada musyawarah tingkat nagari. Selain itu, dibahas juga rencana pembangunan dan program kegiatan berskala nagari. Pada akhir musyawarah ditentukan program prioritas sesuai dengan yang paling dibutuhkan masyarakat dan anggaran yang ada. Prioritas program dan kegiatan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan

masyarakat desa yang meliputi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa; peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; pendayagunaan sumber daya alam; pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa; peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; serta peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Unsur masyarakat yang terlibat dalam musyawarah di tingkat jorong dan nagari terdiri dari tokoh adat (niniak mamak), tokoh agama (alim ulama), tokoh cadiak pandai, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok perempuan (bundo kanduang), perwakilan kelompok pemuda, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok PKK, perwakilan guru, dan perwakilan kelompok lainnya. Keterlibatan semua tokoh tersebut menunjukkan bahwa setiap unsur dan golongan yang ada di nagari sama pentingnya, tidak ada golongan tertentu yang lebih diutamakan ataupun yang tidak dilibatkan. Kebutuhan masing-masing kelompok atau golongan juga dibahas dalam musyawarah. Namun, semua rencana pembangunan dan program kegiatan yang diusulkan tetap akan diprioritaskan berdasarkan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat nagari serta anggaran dana yang tersedia. Bapak Aprizal Datuk Dipati selaku tokoh masyarakat menyampaikan “dalam proses penyusunan APBNagari, bentuk partisipasi kami sebagai tokoh masyarakat ya mengikuti

musyawarah dan menyampaikan ide-ide untuk kegiatan dan pembangunan”. “Tokoh perempuan dan Bundo Kandung yang mengikuti musyawarah juga sama, menyampaikan ide-ide, juga menambahkan ide untuk kegiatan kaum perempuan seperti kegiatan PKK dan pelatihan lainnya seperti membuat dalam hal meningkatkan ekonomi keluarga”, Ibu Puti Nurbaini menambahkan.

Pemerintah nagari bersama dengan pendamping nagari dan BPD juga harus menjamin masyarakat miskin dan masyarakat berkebutuhan khusus tertampung kepentingannya dalam musyawarah nagari. Masyarakat miskin dan berkebutuhan khusus dapat dilibatkan dalam proses musyawarah pengambilan keputusan. Bila terdapat hal yang menghambat masyarakat tersebut untuk terlibat dalam proses, BPD dan fasilitator harus harus memperjuangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat tersebut. Pada dasarnya, salah satu tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga angka kemiskinan akan semakin berkurang setiap tahunnya dan semua masyarakat menjai keluarga yang sejahtera.

Setelah terlaksananya musyawarah nagari, Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan nagari yang bersifat lebih teknis. Musyawarah ini tetap melibatkan BAMUS dan perwakilan unsur masyarakat. Musrenbang nagari menindaklanjuti prioritas kegiatan dan belanja yang telah disepakati dalam musyawarah nagari menjadi lebih terperinci seperti perhitungan teknis, rencana anggaran biaya, jadwal

pelaksanaan kegiatan, dan penanggungjawab kegiatan. Hasil musrenbang nagari ini adalah berupa rancangan RKP Nagari yang kemudian ditetapkan berdasarkan peraturan nagari sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Kemudian, APBNagari disusun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat pada RKP Nagari.

Pemerintahan Nagari Sungai Rumbai Timur memiliki visi ‘menuju masyarakat Nagari sungai Rumbai Timur yang sejahtera, maju, dan mandiri, punya daya saing dalam menghadapi tantangan dari luar atau dari dalam dengan berlandaskan falsafah ‘*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*’. Adapun misi untuk mencapai visi tersebut adalah (1) misi pembangun dialog dan kerjasama dengan semua unsur yang dominan dalam masyarakat di Nagari atau di rantau, yaitu Niniak Mamak, Cadiak Pandai, dan Alim Ulama, yang disebut dengan *tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan*, (2) memasyarakatkan adat dan syarak serta mempertebal rasa badunsanak antar sesama anak Nagari Sungai Rumbai Timur, (3) memfasilitasi kesehatan dan pendidikan, (4) mengurangi angka kemiskinan dengan membangun sarana dan prasarana fisik seperti jalan serta prasarana sosial seperti ruang belajar keterampilan dan magang, (5) memberdayakan, membina, serta memberikan perlindungan terhadap perempuan terutama kaum Ibu dan Bundo Kanduang karena surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, (6) menerapkan prinsip *Good Governance* (bersih dan terbuka) dengan membuat kotak saran/pengaduan atau SMS (pesan singkat) kepada Wali Nagari Langsung untuk perbaikan dan tindak lanjut, serta (7) menerapkan

perencanaan pembangunan partisipatif yaitu bersama masyarakat merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan, dan memelihara untuk kelanjutan manfaatnya. Bergerak dari visi dan misi, kajian permasalahan, kebutuhan, dan prediksi kemampuan anggaran ke depan, berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Nagari Sungai Rumbai Timur, Bapak Arisman Bgd Sutan serta tercantum di dalam LKPJ Nagari Sungai Rumbai Timur Tahun 2016, kebijakan umum yang dirumuskan dikelompokkan ke dalam 9 fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan tersebut terdiri dari fungsi pelayanan umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

Nagari Sungai Rumbai Timur memprioritaskan beberapa sektor pembangunan. Sektor pendidikan bekerjasama dengan UPTD kecamatan Sungai Rumbai, pada musrenbang tahunan mengusulkan sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang pendidikan di Nagari Sungai Rumbai Timur. Usulan yang diberikan contohnya adalah penambahan kelas pada SD, SMP, maupun TK. Pada bidang sarana dan prasarana difokuskan dalam pembukaan akses jalan antar jorong dan antar nagari berhubung Nagari Sungai Rumbai Timur baru dimekarkan pada tahun 2010. Pada bidang kesehatan masyarakat, Nagari Sungai Rumbai Timur telah membangun POLINDES dengan nama PNPM pada tahun 2013 dan telah siap dipakai untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang dipelopori oleh Bidan Nagari Sungai Rumbai Timur. Kegiatan POSYANDU dan DASAWISMA

dilaksanakan secara rutin untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk lansia di Nagari sungai Rumbai Timur.

Berdasarkan LKPJ Nagari Sungai Rumbai Timur, perencanaan program kegiatan pembangunan Nagari Sungai Rumbai Timur adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan lanjutan kantor Wali Nagari Sungai Rumbai Timur.
2. Pembangunan sarana dan prasarana berupa akses jalan yang dirumuskan bersama BAMUS, LPM, dan tokoh-tokoh masyarakat serta Kepala Jorong dalam Musrenbang Nagari.
3. Pembangunan sarana dan prasarana umum lainnya yang dirumuskan bersama BAMUS, LPM, dan tokoh-tokoh masyarakat serta Kepala Jorong dalam Musrenbang Nagari.
4. Penambahan kelas pada TK, SD, dan SMP di Nagari Sungai Rumbai Timur.

Pada tahun anggaran 2016 ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Nagari Sungai Rumbai Timur seperti pada **Tabel IV.2** dan **Tabel IV.3** berikut.

Tabel IV.2 Rencana Kerja Pembangunan Nagari Sungai Rumbai Timur dengan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2016

No.	Nama Kegiatan	Lokasi	Sasaran Kegiatan	Biaya (Rp)	Sumber Dana
1.	Belanja Modal Nagari bersifat Pengadaan:	Nagari Sungai Rumbai	Peningkatan Fasilitas Kantor Nagari	33.000.000	APBD (BM)

	(Pembelian Mobiler Kantor)	Timur			
2.	Belanja Modal Nagari bersifat Pengadaan: (Pengadaan 2 Unit Laptop dan Komputer)	Nagari Sungai Rumbai Timur	Peningkatan Fasilitas Kantor Nagari	20.000.000	APBD (BM)
3.	Belanja Modal Nagari bersifat Pengadaan: (Pemasangan Instalasi Listrik dan Pengadaan Pintu, Jendela, Plaster, dan Acian Gedung Balai Pertemuan)	Nagari Sungai Rumbai Timur	Peningkatan Fasilitas Masyarakat Nagari	76.000.000	APBD (BM)
4.	Belanja Modal Nagari bersifat Pengadaan : (Pembuatan Kamar Mandi Balai Pertemuan)	Jorong Bukit Berbunga	Peningkatan Fasilitas Nagari	20.000.000	APBD (Reward PBB)

	Nagari)				
5.	Rehab Musholla at-Taubah	Jorong Kambang Baru	Peningkatan Fasilitas Musholla/Me sjid Nagari	5.000.000	APBD
6.	Pembelian Baju Seragam Kelompok Yasinan Al- Kautsar	Jorong Balai Timur		5.000.000	APBD
7.	Safari Ramadhan Mesjid Al- Ikhlas	Bukit Berbunga		10.000.000	APBD
Jumlah				169.000.000	

(Sumber: LKPJ Nagari Sungai Rumbai Timur Tahun 2016)

Tabel IV.3 Rencana Kerja Pembangunan Nagari Sungai Rumbai Timur dengan Sumber Dana APBNagari Tahun Anggaran 2016

No.	Nama Kegiatan	Lokasi	Sasaran Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Nagari	Jorong Bukit Berbunga	Peningkatan Fasilitas Masyarakat Nagari	150.000.000	Dana Desa

2.	Rehab Rigid Beton Jalan Kambang Baru/Balai Timur	Jorong Kambang Baru	Peningkatan Fasilitas Masyarakat Nagari	90.000.000	Dana Desa
3.	Drainase Jorong Bukit Berbunga	Jorong Bukit Berbunga	Peningkatan Fasilitas Masyarakat Nagari	102.204.802	Dana Desa
4.	Pembukaan Jalan Lingkar dari Jorong Bukit Berbunga ke Kampung Baru	Jorong Kampung Baru	Peningkatan Fasilitas Masyarakat Nagari	100.000.000	Dana Desa
5.	Pelatihan PKK tentang Tata Boga	Nagari Sungai Rumbai Timur	Peningkatan Wawasan Masyarakat Nagari	15.000.000	Dana Desa
6.	Pelatihan Kader Dasawisma	Nagari Sungai Rumbai Timur	Peningkatan Wawasan Masyarakat Nagari	15.000.000	Dana Desa
7.	Pelatihan Kader Gizi	Nagari Sungai Rumbai Timur	Peningkatan Wawasan Masyarakat Nagari	15.000.000	Dana Desa

8.	Pelatihan Qasidah Rebana	Nagari Sungai Rumbai Timur	Peningkatan Wawasan Masyarakat Nagari	50.000.000	Dana Desa
9.	Sosialisasi Dampak Negatif Narkoba	Nagari Sungai Rumbai Timur	Peningkatan Wawasan Masyarakat Nagari	20.000.000	Dana Desa
10.	Pelatihan KPMD	Nagari Sungai Rumbai Timur	Peningkatan Wawasan Masyarakat Nagari	15.000.000	Dana Desa
11.	Pelatihan Pelayanan Publik	Nagari Sungai Rumbai Timur	Peningkatan Wawasan Masyarakat Nagari	35.000.000	Dana Desa
12.	Pelatihan dan Pembentukan BUM Nag	Nagari Sungai Rumbai Timur	Peningkatan Wawasan Masyarakat Nagari	25.000.000	Dana Desa
Jumlah				632.284.802	

(Sumber: LKPJ Nagari Sungai Rumbai Timur Tahun 2016)

Pada bidang pelaksanaan pembangunan difokuskan kepada pembukaan akses jalan dan pembuatan drainase di Nagari Sungai Rumbai Timur. Akses jalan dan drainase merupakan sarana vital bagi suatu nagari agar kegiatan nagari berjalan dengan lancar. Pada bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat banyak diadakan pelatihan-pelatihan serta sosialisasi guna meningkatkan wawasan masyarakat nagari. Semua program kegiatan berhasil direalisasikan. Selain itu, juga terdapat satu buah kegiatan yang pelaksanaannya dari Kabupaten atau pihak ketiga, yaitu pembukaan jalan lingkaran Jorong Kampung Baru. Jalan lingkaran tersebut sepanjang 1,9 km dengan biaya Rp150.000.000,00.

APBNagari Sungai Rumbai Timur Tahun 2017 dapat dilihat pada **Tabel IV.4** berikut. Dalam Pasal 8 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Hal tersebut juga berlaku untuk nagari.

Tabel IV.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Rumbai Timur Tahun 2017

No.	Keterangan	Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan Nagari	1.700.387.231
2.	Belanja Nagari	1.666.347.231
	1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	427.360.000
	2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan	829.169.831
	3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	156.380.000

	4)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	247.437.400
	5)	Belanja Tidak Terduga	0
3.	Jumlah Belanja		1.666.347.231
4.	Surplus/Defisit		46.040.000
5.	Pembiayaan Nagari		
	1)	Penerimaan Pembiayaan	46.040.000
	2)	Pengeluaran Pembiayaan	46.040.000

(Sumber: APBNagari Sungai Rumbai Timur Tahun Anggaran 2017)

Kemudian, dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa pendapatan desa terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer, dan pendapatan lain-lain. Kelompok pendapatan tersebut juga berlaku untuk nagari.

Tabel IV.5 Sumber Pendapatan Nagari Sungai Rumbai Timur

No.	Pendapatan		Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Nagari		12.000.000
2.	Pendapatan Transfer		1.688.387.231
	1)	Dana Desa (DD)	810.437.000
	2)	Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
	3)	BOP PBB 2016	1.993.231
	4)	Alokasi Dana Desa	865.957.000
3.	Pendapatan Lain-Lain		0
Jumlah Pendapatan			1.700.387.231

(Sumber: APBNagari Sungai Rumbai Timur Tahun Anggaran 2017)

Berdasarkan pada **Tabel IV.4**, program kegiatan ataupun pembangunan yang tercantum pada APBNagari terdiri dari berbagai bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Masyarakat memberikan gagasannya untuk program kegiatan maupun pembangunan dalam bidang pelaksanaan pembangunan nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Penjabaran program-program usulan masyarakat untuk masing-masing bidang tersebut yang dicantumkan dalam APBNagari Sungai Rumbai Timur Tahun 2017 dapat dilihat pada **Tabel IV.6**, **Tabel IV.7**, dan **Tabel IV.8**.

Tabel IV.6 Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

No.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Lokasi	Anggaran (Rp)
1.	Pemasangan Flapon, Singok, Keramik, dan Cat Gedung Balai Pertemuan Nagari	Jorong Bukit Berbunga	139.327.000
2.	Rehab Kamar Mandi Mushola Tawakal	Jorong Kampung Baru	10.000.000
3.	Rigid Beton Jalan Lingkar Jorong Kambang Baru	Jorong Kambang Baru	87.080.000
4.	Lanjutan Rigid Beton Jorong Kambang Baru	Jorong Kambang Baru	25.620.000

5.	Rigid Beton Jalan Lingkar Jorong Balai Timur	Jorong Balai Timur	84.970.000
6.	Rigid Beton Jalan Samping Puskesmas Jorong Balai Timur	Jorong Balai Timur	34.220.000
7.	Rigid Beton Jalan Lingkar Jorong Kampung Baru	Jorong Kampung Baru	41.570.000
8.	Lanjutan Rigid Beton Jorong Kampung Baru	Jorong Kampung Baru	13.890.000
9.	Rigid Beton Depan SD 09 Jorong Bukit Berbunga	Jorong Bukit Berbunga	94.130.000
10.	Lanjutan Drainase Jorong Bukit Berbunga	Jorong Bukit Berbunga	118.580.000
11.	Drainase Depan UPTD Jorong Bukit Berbunga	Jorong Bukit Berbunga	63.289.600

(Sumber: APBNagari Sungai Rumbai Timur Tahun Anggaran 2017)

Pada **Tabel IV.6** dapat dilihat bahwa pembangunan masih difokuskan pada bidang sarana dan prasarana berupa jalan di jorong-jorong yang terdapat di Nagari Sungai Rumbai Timur. Ketersediaan akses jalan merupakan aspek krusial yang dapat mempengaruhi aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, juga terdapat pembuatan drainase. Pembuatan drainase ini bersifat sangat penting dalam pembangunan nagari, yaitu untuk mencegah

terjadinya banjir serta kerusakan jalan dan bangunan yang disebabkan oleh genangan atau aliran air.

Tabel IV.7 Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)	70.680.000	-
2.	Pembinaan Bidang Keagamaan Nagari	80.700.000	-
3.	Pembinaan Kepemudaan Nagari	5.000.000	-

(Sumber: APBNagari Sungai Rumbai Timur Tahun Anggaran 2017)

Program kerja bidang pembinaan kemasyarakatan pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk seminar. Pemberitahuan akan adanya seminar kepada masyarakat biasanya melalui pengumuman di mesjid dan mushala serta ditempel pada papan informasi di kantor Wali Nagari. Program pembinaan yang dilaksanakan bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat.

Tabel IV.8 Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)	15.800.000	PKK Nagari dan PKK Jorong

2.	Kegiatan Lembaga Nagari	34.550.000	-
3.	Sosialisasi Adat Minangkabau	20.000.000	-
4.	Pelatihan Kader PKK Nagari	50.000.000	Membatik
5.	Pelatihan Masak-memasak	50.000.000	-
6.	Pelatihan Manajemen Mesjid	20.000.000	Mengatasi PEKAT
7.	Pelatihan Randai	22.087.400	-
8.	Pengadaan Sistem Informasi Nagari Berbasis Website	35.000.000	-

(Sumber: APBNagari Sungai Rumbai Timur Tahun Anggaran 2017)

Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bertujuan untuk menunjang ekonomi keluarga. Dalam pertemuan bulanan, ibu-ibu PKK melaksanakan kegiatan yang beragam seperti pelatihan masak-memasak, pelatihan make-up, pelatihan membatik, dan membuat prakarya dari barang bekas. Dari pelatihan tersebut diharapkan kaum ibu dapat memanfaatkan keterampilan yang didapat dalam hal menunjang ekonomi keluarga.

Dari pemerintahan kabupaten terdapat himbauan untuk melestarikan adat dan budaya Minangkabau. Masyarakat diharapkan benar-benar memahami dan menerapkan lagi falsafah '*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*'. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi adat Minangkabau. Selain itu, terdapat pelatihan randai untuk melestarikan kesenian nagari.

Dalam hal transparansi kepada masyarakat, APBNagari ditempelkan di papan informasi di kantor kenagarian Sungai Rumbai Timur. Masyarakat juga diberikan akses untuk bertanya langsung kepada perangkat Nagari mengenai

APBNagari tersebut dan pelaksanaannya. Selain itu, setiap minggu pada hari Jumat, dilakukan penyampaian kondisi keuangan nagari dan pelaksanaan APBNagari di mesjid Al-Ikhlas Nagari Sungai Rumbai Timur oleh Wali Nagari. Untuk pengadaan *website* Nagari Sungai Rumbai Timur masih diproses pada tahun anggaran ini seperti tercantum pada program kerja bidang pemberdayaan masyarakat dalam APBNagari Sungai Rumbai Timur Tahun 2017. Informasi yang tersedia pada *website* nagari masih sangat minim dan kurang *diupdate*. Dokumen-dokumen anggaran yang seharusnya bisa diakses oleh masyarakat juga belum tersedia. Berikut adalah tampilan *website* Nagari Sungai Rumbai Timur.



Gambar IV.2 Tampilan *website* Nagari Sungai Rumbai Timur

Partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi asli dan semu. Masyarakat Nagari Sungai Rumbai Timur terlibat langsung dalam musyawarah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) yang bersifat demokratis. Masyarakat ikut serta dalam penetapan rencana pembangunan dan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, bentuk partisipasi tersebut adalah partisipasi asli. Sedangkan,

berdasarkan motivasinya masyarakat Sungai Rumbai Timur melakukan partisipasi spontan dan partisipasi ajakan. Sebagian besar masyarakat sudah menyadari pentingnya partisipasi dengan terlibat langsung dalam musyawarah nagari, sebagian kecilnya mengikuti karena adanya ajakan atau undangan untuk datang.

Partisipasi masyarakat Sungai Rumbai Timur sudah mendekati model yang ideal, yaitu partisipasi asli dan spontan. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan juga pelaksanaannya. Bentuk partisipasi tersebut sangat mendukung tercapainya hasil yang benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dapat berupa pikiran/gagasan, keterampilan/keahlian, tenaga, harta benda, dan uang. Dalam hal penyusunan APBNagari ini partisipasi masyarakat lebih banyak dalam bentuk pikiran/gagasan sebagai usulan pembangunan atau kegiatan. Empat bentuk partisipasi lainnya dilakukan pada tahapan pelaksanaan.

Dalam tangga partisipasi, partisipasi masyarakat di Nagari Sungai Rumbai Timur termasuk ke dalam kategori *Citizen Power*. Peran serta masyarakat berada pada derajat kekuasaan dimana sudah terjadi pembagian hak, tanggungjawab dan wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Masyarakat mengambil bagian dalam menentukan hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi hidup dan kehidupan masyarakat itu sendiri.

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Nagari di Nagari Sungai Rumbai Timur

1. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari didukung dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan adanya asas partisipatif. Penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk di dalamnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus mengikutsertakan masyarakat. Masyarakat terlibat secara langsung dari proses perencanaan hingga pelaksanaan.

Pada tahun 2016, Nagari sungai Rumbai Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 3352 jiwa yang terdiri dari 804 kepala keluarga dengan kepadatan penduduk 152 jiwa/km². Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1700 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1652 jiwa. Faktor jenis kelamin tidak lagi terlalu berpengaruh karena peran perempuan telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi wanita. Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal penyusunan APBDesa harus melibatkan perempuan. Dalam Pasal 58 disebutkan bahwa anggota BPD ditetapkan dengan memperhatikan beberapa hal, salah satunya perempuan. Dengan kata lain, anggota BPD harus ada yang dari kalangan perempuan.

Musyawarah desa diikuti oleh unsur-unsur masyarakat. Dalam Pasal 54 ayat (1) dijelaskan bahwa unsur masyarakat tersebut salah satunya terdiri dari kelompok perempuan.

Tenaga kerja merupakan suatu pertimbangan yang sangat penting dalam pembangunan suatu wilayah. Adanya sumber daya manusia yang produktif dapat memberikan kontribusi yang besar pada wilayah tersebut. Berdasarkan usia kerja, jumlah penduduk Nagari Sungai Rumbai Timur paling banyak adalah pada usia produktif (22-56 tahun) yaitu 1564 jiwa. Banyaknya penduduk usia produktif ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam partisipasi masyarakat. Kelompok usia produktif lebih memiliki keterikatan dengan nilai moral dan norma masyarakat yang lebih mantap, sehingga cenderung banyak berpartisipasi. Selain itu, kelompok usia produktif merupakan sumber daya yang sangat menunjang pelaksanaan kegiatan dan pembangunan Nagari.

Pendidikan merupakan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan mengajarkan masyarakat pemahaman akan partisipasi dan pentingnya partisipasi itu sendiri. Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Nagari Sungai Rumbai Timur paling banyak memiliki tingkat pendidikan SLTA/ sederajat yaitu 869 jiwa. Penduduk dengan tingkat pendidikan akademi (D1, D2, dan D3) berjumlah 51 jiwa dan penduduk dengan tingkat pendidikan sarjana (S1 dan S2) berjumlah 94 jiwa. Jika

dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif, jumlah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan SLTA/ sederajat dan lebih tinggi mencapai angka 65%. Angka tersebut sudah cukup baik untuk mendukung partisipasi masyarakat.

2. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Selain adanya faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, terdapat juga beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut antara lain dari kondisi sosial budaya masyarakat, keberagaman etnis, dan kurangnya ketersediaan media informasi.

Jenis pekerjaan penduduk Nagari Sungai Rumbai Timur sangat beragam yaitu petani, buruh tani, PNS, peternak, montir, tukang batu, tukang kayu, tukang gali sumur, tukang jahit, dan pedagang. Namun, mayoritas penduduk bermata pencaharian bertani/berkebun dan berdagang (sebagian penduduk merangkap kedua jenis pekerjaan). Nagari Sungai Rumbai Timur mempunyai potensi unggulan di bidang perkebunan karet, sawit, dan berdagang. Sebanyak $\pm 70\%$ masyarakat Nagari Sungai Rumbai Timur berkebun dengan kepemilikan kebun mulai dari 1 Ha sampai dengan 100 Ha. Dalam hal tingkat kemiskinan, jumlah rumah tangga miskin di Nagari Sungai Rumbai Timur terbilang cukup rendah dengan persentase 8,3%.

Faktor pekerjaan dan penghasilan tidak terlalu berpengaruh terhadap ada atau tidaknya partisipasi masyarakat di Nagari Sungai Rumbai Timur, namun lebih berpengaruh kepada bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat. Musyawarah dan kegiatan nagari pada umumnya dilaksanakan pada hari Minggu yang merupakan hari libur kebanyakan orang. Namun, pasar di Nagari Sungai Rumbai Timur adalah pada hari Jumat dan Minggu. Sebagian masyarakat yang mempunyai pekerjaan berdagang ataupun yang bekerja pada hari tersebut memilih untuk tidak terlibat secara langsung, namun memberikan partisipasi dalam bentuk uang dan harta benda. Dengan demikian, mereka tetap bisa menjalankan pekerjaannya dan tetap ikut berpartisipasi. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi sosial budaya di Nagari Sungai Rumbai Timur.

Kehidupan sosial budaya di Nagari Sungai Rumbai Timur sudah menuju masyarakat perkotaan yang lebih banyak mementingkan kepentingan sendiri daripada kekeluargaan. Contohnya adalah seperti yang dikatakan oleh Bapak Ihsanul Habibie dalam wawancara, “ketika ada kegiatan gotong-royong di nagari beberapa masyarakat memilih untuk tetap melaksanakan kegiatannya masing-masing dan tidak datang, namun mereka memberikan partisipasi berupa alat atau barang yang dapat membantu keberlangsungan kegiatan”.

Penduduk Nagari Sungai Rumbai Timur terdiri dari berbagai etnis atau suku. Penduduk dominan adalah etnis asli yaitu Minangkabau. Kemudian, terdapat etnis Jawa karena Kabupaten Dharmasraya

merupakan daerah transmigrasi. Selain itu, terdapat etnis Jambi karena berbatasan langsung dengan provinsi Jambi, etnis Batak, dan etnis lainnya. Keberagaman etnis ini berpengaruh besar dalam partisipasi masyarakat. Perbedaan etnis menimbulkan perbedaan keinginan dan kebutuhan yang berkaitan dengan masing-masing etnis. Dengan demikian, akan menghasilkan lebih banyak jenis usulan kegiatan yang akan mempengaruhi pengambilan kebijakan di Nagari.

Bapak Mendri Doni menjelaskan bahwa ada juga masyarakat yang memberikan partisipasi dalam bentuk hibah tanah. Namun, hal ini kerap kali menimbulkan kendala. Ketika semua proses pembangunan telah dirancang dan sudah dibuat anggarannya serta bersiap untuk dilaksanakan, dari pihak keluarga masyarakat yang memberikan hibah tanah ada yang tidak setuju. Hal ini terjadi karena masalah komunikasi dan juga tidak adanya surat bukti hibah tanah. Tentunya masalah ini sangat penghambat pembangunan dan mengharuskan perancangan ulang di lahan yang baru. Berdasarkan kejadian tersebut, pemerintah nagari mengambil kebijakan untuk selalu membuat surat hibah tanah jika ada masyarakat yang menghibahkan tanahnya untuk pembangunan nagari berikutnya.

Kurangnya ketersediaan media informasi di nagari juga menghambat partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak memiliki akses yang cukup untuk mengetahui tentang APBNagari maupun kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan di nagari. Dengan kurangnya media, penyampaian aspirasi masyarakatpun menjadi terbatas.